

IMPLEMENTASI PROGRAM APARTEMEN IKAN SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN KELAUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aiman Sabar Rezeky¹, Ghaitza Zahira Sofa², Nurul Aulia³, Naya Tsaqifah Fisabilillah⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: aimansrezeky@gmail.com^{1*}, ghaitsazahirasofa0@gmail.com²,
nurulauliaaa1205@gmail.com³, nayatsaqifah007@gmail.com⁴

Info Artikel

Submitted: 10 April 2026

Revised : 30 April 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Published: 23 Mei 2026

Keywords: Blue Economy, Fish Apartments, Marine Affairs and Fisheries, South Sulawesi.

Kata Kunci: Ekonomi Biru, Apartemen Ikan, Kelautan dan Perikanan, Sulawesi Selatan.

Abstract

This study was prompted by the increasing degradation of marine ecosystems in South Sulawesi Province due to illegal fishing practices, which have led to a decline in the quality of marine ecosystems and the welfare of fishermen. This study aims to analyse the implementation of the Fish Apartment Programme as part of the blue economy policy in supporting the recovery of marine ecosystems and improving the welfare of coastal communities. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentary analysis. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Fish Apartment Programme in South Sulawesi Province has clear objectives in creating new habitats for fish, supporting marine conservation, and improving the efficiency of fishing activities for small-scale fishermen. This programme also demonstrates positive potential for the recovery of marine ecosystems through the creation of artificial habitats that marine life is beginning to utilise as breeding grounds. However, policy implementation still faces challenges in the form of regulatory limitations, oversight, and community capacity in programme management. Consequently, strengthening regulations, community education, and continuous monitoring are crucial factors in supporting the ecological and economic success of the Fish Apartment Programme.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya degradasi ekosistem laut di Provinsi Sulawesi Selatan akibat praktik penangkapan ikan yang ilegal sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem laut serta kesejahteraan nelayan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Apartemen Ikan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan habitat baru bagi ikan, mendukung konservasi laut, serta meningkatkan efisiensi aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil. Program ini juga menunjukkan potensi positif terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat buatan yang mulai dimanfaatkan biota laut sebagai tempat berkembang biak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, pengawasan, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan program. Dengan demikian,

penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Apartemen Ikan secara ekologis dan ekonomis.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan serta perikanan dan menjadi salah satu produsen ikan terbesar di dunia (Muawanah *et al.*, 2018). Kekayaan tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, penyediaan sumber pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan ekonomi negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman ekosistem laut yang tinggi, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang berfungsi penting sebagai habitat berbagai biota laut. Mengoptimalkan potensi sumber daya laut menjadikan bangsa Indonesia maju dan makmur sepanjang dikelola secara baik dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan (Halim *et al.*, 2020).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor kelautan dan perikanan turut menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah karena wilayahnya berada pada jalur laut nasional dan internasional serta memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar. Data yang dirilis oleh Pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Sulawesi Selatan mencapai sekitar 500.000 ton, sementara potensi maksimalnya diperkirakan dapat mencapai 1 juta ton per tahun (Kassa, 2025). Potensi tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

Namun demikian, besarnya potensi sumber daya laut Indonesia juga diiringi dengan berbagai tantangan dan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Degradasi ekosistem laut saat ini menjadi persoalan serius yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia (antropogenik). Faktor alam seperti abrasi, perubahan iklim, dan pengasaman laut turut memperburuk kondisi lingkungan perairan. Penelitian oleh Afdal *et al* (2025) menunjukkan bahwa kondisi ekosistem lamun dan terumbu karang di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya pengasaman laut dan perubahan parameter oseanografi. Sementara itu, aktivitas manusia menjadi faktor dominan penyebab kerusakan lingkungan laut, seperti pencemaran limbah industri dan domestik, reklamasi pantai, *overfishing*, *illegal fishing*,

penggunaan bom ikan dan racun sianida, hingga pencemaran sampah plastik laut. Kondisi tersebut mengakibatkan rusaknya habitat laut, menurunnya kualitas air, terganggunya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya produktivitas sumber daya perikanan.

Salah satu bentuk kerusakan ekosistem laut yang paling mengkhawatirkan adalah praktik *destructive fishing*, terutama pemboman ikan. Praktik ini masih marak terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Takalar dan Kepulauan Tanakeke, masyarakat nelayan menyaksikan langsung kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang akibat penggunaan bom ikan dan racun kalium sianida yang terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan di Pulau Lanjukang, kerusakan terumbu karang diduga kuat terjadi akibat aktivitas pengeboman ikan dan kapal yang terdampar. Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta terganggunya keseimbangan ekologi kawasan pesisir dan laut (Rakhman & Chandra, 2024).

Permasalahan degradasi ekosistem laut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan kecil sebagai kelompok yang sangat bergantung pada sumber daya laut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Penurunan hasil tangkapan ikan, perubahan lokasi penangkapan, harga ikan yang tidak stabil, serta keterbatasan modal dan teknologi menjadi tantangan yang dihadapi nelayan saat ini. Meskipun demikian, data yang dirilis oleh Humas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan bahwa hasil tangkapan nelayan kecil pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 7,5 juta ton atau naik sekitar 14 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada pada kisaran 6 juta ton (Riyono, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan, namun memerlukan pengelolaan yang lebih berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terus meningkat tanpa merusak ekosistem laut.

Dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan ekonomi biru (*blue economy*). Kebijakan ekonomi biru bertumpu pada lima arah kebijakan utama: Pertama, memperluas kawasan konservasi laut yang ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2025 untuk menjaga tempat pemijahan alami ikan; Kedua, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan; Ketiga, pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; Keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Dengan demikian, tujuan fundamental dari ekonomi biru adalah memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak lagi

bergantung pada praktik eksploitasi yang merusak lingkungan (Trenggono, 2024).

Salah satu bentuk inovasi yang dinilai potensial dalam mendukung pemulihan ekosistem laut dan peningkatan produktivitas perikanan adalah penerapan apartemen ikan atau rumah ikan. Rumah ikan merupakan bangunan berongga yang ditempatkan di dalam perairan sebagai habitat buatan untuk menggantikan fungsi ekologis habitat alami ikan. Struktur ini berfungsi sebagai tempat perlindungan, pemijahan, dan pertumbuhan ikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan di suatu wilayah perairan. Penelitian oleh Nanto *et al* (2024) menunjukkan bahwa penerapan rumah ikan di Pulau Kalih Kabupaten Serang menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki kondisi habitat laut dan mendukung keberlanjutan produktivitas perikanan. Oleh karena itu, implementasi program apartemen ikan menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru dan upaya rehabilitasi ekosistem laut, khususnya di wilayah pesisir yang mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fokus penelitian. Metode kualitatif dipilih untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti (Saleh, 2023). Data utama diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan data yang diinginkan, yaitu dengan pemangku kepentingan yang terkait (Firdaus & Safitri, 2013). Dalam konteks ini, peneliti telah menetapkan informan dari bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penelitian dilakukan Kantor yang terletak di Jalan Baji Minasa Nomor 12, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai data pendukung, penulis juga mengumpulkan berbagai pustaka yang relevan dengan konteks dan masalah penelitian, baik dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan semacamnya maupun foto (Haryoko *et al.*, 2020). Adapun proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Erfan *et al.* (2025), yaitu:

- a. Reduksi Data: Data yang telah terkumpul diseleksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah agar hasil penelitian menjadi lebih mudah diungkapkan;

- b. Penyajian Data: Data disajikan secara deskriptif dalam bentuk yang sistematis, logis, dan rasional, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca; serta,
- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan: Data-data yang ada diidentifikasi dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk pola dan struktur yang sistematis. Hasil dari proses ini kemudian digunakan sebagai temuan untuk menarik kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Content of Policy (Isi Kebijakan)

Menurut Merilee S. Grindle, isi kebijakan (*content of policy*) mencakup beberapa hal, diantaranya:

1. Kejelasan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama implementasi Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalam rangka pemulihan sumber daya ikan pada habitat yang mengalami degradasi akibat praktik penangkapan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pemboman dan pembiusan sehingga merusak ekosistem laut. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan habitat baru bagi ikan melalui penyediaan “rumah ikan”, yang secara berkelanjutan akan berfungsi sebagai daerah pemijahan, tempat bermain, dan tempat berkembang biak bagi ikan. Namun demikian, meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, keterukuran program Apartemen Ikan, khususnya mengenai angka kuantitatif terkait peningkatan stok ikan atau produktivitas nelayan dalam tahap awal ini masih dalam perlu penguatan, hal ini disebabkan karena regulasi mengenai tata kelola program Apartemen Ikan belum sepenuhnya disusun dan akan direncanakan selesai pada akhir tahun 2026.

2. Manfaat Kebijakan bagi Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, implementasi Program Apartemen Ikan di Provinsi telah berdampak bagi kelompok sasaran utama, yaitu nelayan kecil. Nelayan kecil mulai merasakan manfaat kebijakan ini, terutama dari segi efisiensi biaya operasional saat melaut. Kebijakan ini memudahkan nelayan dalam menangkap ikan tanpa harus melaut terlalu jauh ke wilayah perairan tengah laut, sehingga dapat meminimalisir penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menghemat waktu. Program ini juga mendukung konsep ekonomi biru yang menjadi pilar strategis dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai

swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045. Ekonomi biru yang dimaksud berfokus pada pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut, pesisir, dan perairan darat (pangan biru) serta industrialisasi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, keunggulan kebijakan ini juga terletak pada pemberian akses terbuka (*open access*) kepada nelayan untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih merata.

3. Perubahan yang Diharapkan

Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah pola penangkapan ikan menjadi lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan. Nelayan tidak lagi bergantung pada metode eksploratif (mencari ikan tanpa kepastian), melainkan dapat memanfaatkan lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan ini bertujuan menekan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Dengan tersedianya habitat baru, ikan-ikan akan berkumpul dan berkembang biak, sehingga nelayan dapat menangkap ikan berukuran besar di luar kawasan inti konservasi. Hal ini diharapkan meningkatkan pendapatan nelayan karena ikan berukuran besar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Namun, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat akan sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan nelayan, sehingga diperlukan edukasi berkelanjutan terkait larangan penangkapan ikan yang masih berukuran kecil (*baby fish*) demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Laksani *et al* (2025) juga menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai bentuk dan manfaat apartemen ikan tidak hanya menggambarkan keberhasilan transfer pengetahuan kepada masyarakat, namun juga menunjukkan potensi penerimaan penerapan apartemen ikan oleh nelayan.

4. Dukungan Sumber Daya Kebijakan

Dari aspek sumber daya anggaran, implementasi kebijakan ini didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), meskipun jumlahnya terbatas dan harus bersaing dengan sektor pembangunan lainnya. Program ini dilaksanakan secara bertahap di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan target perluasan cakupan wilayah secara bertahap. Adapun dari sisi teknologi, apartemen ikan dirancang dengan spesifikasi tertentu, seperti penggunaan bahan *polypropylene* yang tahan hingga sekitar 10 tahun dan aman bagi lingkungan laut. Desain teknis juga telah disesuaikan dengan kondisi oseanografi, seperti arus dan kedalaman laut, guna menjamin stabilitas dan efektivitasnya. Secara umum, kebutuhan

**IMPLEMENTASI PROGRAM APARTEMEN IKAN SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN
KELAUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Aiman Sabar Rezeky¹, Ghaitsa Zahira Sofa², Nurul Aulia³, Naya Tsaqifah Fisabilillah⁴

bahan dan komponen pembuatan satu modul apartemen ikan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan Bahan dan Komponen Pembuatan Satu Modul Apartemen Ikan

No	Komponen	Bahan	Jumlah	Satuan	Keterangan
A KERANGKA					
1	Partisi tegak	Plastik (35x32x1,2) cm	88	Keping	
2	Partisi datar	Plastik (35x35x1,2) cm	35	Keping	
3	Tali pengikat	PA Mono No.500	3	Roll	150 m/roll
4	Tali cabang	PE Ø 4 mm	0,5	Roll	200 m/roll
B ATRAKTOR					
1	Rumbai-rumbai	Pita Plastik / PE (packing band)	1/2	Roll	
C PEMBERAT					
1	Pemberat kotak	Beton Cor (35x35x12)	4	Buah	Per Modul Apartemen Ikan
2	Pemberat balok	Beton Cor (12x12x120) cm	2	Buah	Per Modul Apartemen Ikan

Sumber: Dokumen Juknis Apartemen Ikan DKP Provinsi Sulawesi Selatan (2026).

Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, kebijakan ini mengandalkan partisipasi masyarakat lokal. Pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat, seperti Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) dan kelompok konservasi. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan. Namun demikian, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami tata kelola dan pemanfaatan apartemen ikan masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan penguatan melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas.

B. Context of Implementation (Konteks Implementasi)

Dalam perspektif Merilee S. Grindle, konteks implementasi mencakup kondisi sosial, politik, ekonomi, serta interaksi antar-aktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

1. Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Karakteristik masyarakat nelayan yang bergantung pada sumber daya laut sangat memengaruhi penerimaan terhadap kebijakan. Kondisi sosial-ekonomi nelayan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh ikan menjadi faktor utama tingginya tingkat penerimaan terhadap Program Apartemen Ikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, konteks antusiasme masyarakat terlihat dari kesiapan mereka untuk memanfaatkan program sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti larangan menangkap ikan di area inti apartemen ikan. Selain itu, terdapat kesadaran awal untuk mendukung upaya konservasi, misalnya dengan menerima kemungkinan penutupan sementara kawasan guna mendukung proses pemijahan ikan. Penerimaan masyarakat ini menunjukkan bahwa kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak berpadu dengan nilai-nilai adaptif masyarakat terhadap kebijakan baru dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi.

2. Tingkat Kepatuhan dan Respons Kelompok Sasaran

Karena program apartemen ikan masih berada pada tahap awal atau baru sekitar 3-4 bulan pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan nelayan belum dapat diukur secara empiris. Namun, respons awal yang ditunjukkan masyarakat cenderung positif terhadap rencana aturan yang akan diterapkan. Penerimaan ini mengindikasikan adanya potensi kepatuhan di masa mendatang, meskipun keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kejelasan regulasi, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

3. Hubungan Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Dalam implementasi kebijakan ini, hubungan antar-aktor menunjukkan adanya upaya kolaboratif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dan sosialisasi sejak awal untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan dan mekanisme program. Strategi yang digunakan adalah pelibatan kelompok masyarakat sebagai penjaga aset, namun dengan prinsip non-monopoli. Artinya, tidak ada satu kelompok Masyarakat yang memiliki kontrol eksklusif terhadap pemanfaatan apartemen ikan. Semua pihak diberikan akses selama tidak merusak, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat inklusif. Hal ini penting untuk meminimalkan konflik kepentingan dan mendorong rasa memiliki bersama terhadap program.

4. Kapasitas Institusional Pelaksana Kebijakan

Dari sisi kelembagaan, DKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki dukungan melalui tujuh cabang dinas yang berperan dalam pengawasan dan pendampingan. Selain itu, koordinasi lintas level pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa juga dilakukan untuk memperkuat implementasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas formal pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan menjalin kolaborasi dengan masyarakat sebagai aktor utama di lapangan, sehingga pendekatan berbasis komunitas dilakukan oleh DKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai strategi penting dalam menguatkan kapasitas institusi pelaksana kebijakan.

5. Kondisi Lingkungan Fisik

Faktor lingkungan fisik dan oseanografi menjadi pertimbangan utama dalam implementasi kebijakan. Penempatan apartemen ikan dilakukan berdasarkan kajian terhadap arus laut, tingkat kekeruhan air, serta kedalaman perairan. Lokasi yang dipilih umumnya berada pada kedalaman 10 hingga 30 meter, yang dianggap sesuai untuk mendukung stabilitas struktur dan keberlanjutan habitat ikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain program dan kondisi lingkungan setempat.

6. Mekanisme Pengawasan dan Pemeliharaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan pemeliharaan masih dalam tahap pengembangan melalui penyusunan regulasi. Rencana yang akan diterapkan adalah pembentukan forum masyarakat sadar konservasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dalam mekanisme ini, masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan di area inti apartemen ikan, melainkan di sekitarnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menjaga fungsi konservasi, tetapi juga tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan. Namun, karena mekanisme ini belum sepenuhnya berjalan, kontribusinya terhadap keberlanjutan kebijakan masih bersifat potensial dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

C. Dampak Implementasi Kebijakan

Dalam perspektif Merilee S. Grindle, dampak implementasi kebijakan menekankan pada sejauh mana kebijakan menghasilkan perubahan nyata, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

1. Dampak terhadap Keberlanjutan Ekosistem Laut

Implementasi Program Apartemen Ikan menunjukkan potensi positif terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Dalam jangka waktu tertentu, struktur apartemen ikan akan ditumbuhi terumbu karang dan alga yang berfungsi sebagai habitat baru bagi berbagai biota laut. Keberadaan habitat buatan ini berkontribusi pada peningkatan daya dukung lingkungan, khususnya sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi ikan. Bahkan, dalam waktu relatif singkat (sekitar satu minggu), telah ditemukan adanya ikan yang bertelur di sekitar lokasi apartemen ikan. Dengan demikian, program ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap terumbu karang alami, karena aktivitas ikan dan nelayan dapat terdistribusi ke habitat buatan yang telah disediakan.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan

Dari sisi ekonomi, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan secara berkelanjutan. Peningkatan produksi tangkapan menjadi salah satu indikator utama, namun tetap dalam kerangka prinsip konservasi. Nelayan didorong untuk menangkap ikan berukuran besar yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, sementara penangkapan ikan berukuran kecil (*baby fish*) tidak diperbolehkan karena dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Dengan pendekatan ini, kebijakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil tangkapan secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan nilai jual, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga indikator implementasi kebijakan, yaitu: *content of policy* (isi kebijakan), *context of implementation* (konteks implementasi), dan dampak implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Program Apartemen Ikan di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum telah dirancang dengan arah kebijakan yang tepat dan memiliki potensi keberhasilan yang cukup besar. Dari aspek isi kebijakan, program ini telah memiliki tujuan yang jelas, yakni pemulihan sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan ekonomi biru. Manfaat kebijakan juga telah dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran, khususnya dalam efisiensi biaya operasional dan kemudahan akses penangkapan ikan. Namun, dari sisi keterukuran tujuan dan kejelasan regulasi tata kelola masih perlu diperkuat agar implementasi dapat

berjalan lebih optimal dan terarah.

Dari sisi konteks implementasi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan yang sedang mengalami kesulitan memperoleh ikan justru menjadi faktor pendorong tingginya penerimaan terhadap program ini. Hubungan antar-aktor telah terjalin secara kolaboratif dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola. Meskipun demikian, mekanisme pengawasan, tingkat kepatuhan, serta kapasitas kelembagaan masih dalam tahap pengembangan, sehingga membutuhkan penguatan lebih lanjut untuk menjamin keberlanjutan implementasi. Sementara itu, dari sisi dampak implementasi, program ini menunjukkan indikasi awal yang positif, baik terhadap pemulihan ekosistem laut melalui pembentukan habitat baru maupun terhadap potensi peningkatan ekonomi nelayan melalui hasil tangkapan yang lebih bernilai. Akan tetapi, dampak tersebut masih bersifat jangka awal dan akan sangat bergantung pada keberhasilan pengelolaan, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta konsistensi penerapan prinsip konservasi.

Dengan demikian, keberhasilan Program Apartemen Ikan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh sinergi antara kejelasan kebijakan, kesiapan konteks implementasi, dan penguatan aspek pengelolaan di lapangan. Upaya yang perlu diprioritaskan ke depan adalah penyusunan regulasi yang lebih kuat sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, sehingga program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan baik secara ekologis maupun ekonomis. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara kuantitatif dampak jangka panjang Program Apartemen Ikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan pemulihan stok ikan dengan menggunakan indikator yang terukur. Selain itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas tata kelola dan tingkat kepatuhan masyarakat setelah regulasi program diterapkan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, A., Bengen, D. G., Wahyudi, A. J., Rastina, R., Purwiyanto, A. I. S., Prayitno, H. B., Hamzah, F., Suteja, Y., Adi, N. S., & Koropitan, A. F. (2025). Variability of Marine Carbonate Systems in Seagrass and Coral Reef Ecosystems of Pari and Lombok Islands, Indonesia. *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences*, 30(2), 221-236. <https://doi.org/10.14710/ik.ijms.30.2.221-236>.
- Erfan, Haryati, E., Sunarya, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Pemberdayaan Perempuan Pesisir Madura: Studi Kasus pada Industri Rumput Laut dan Olahan Hasil Laut di Pulau Poteran

- Sumenep. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 183–195. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.574>.
- Firdaus, M., & Shafitri, N. (2013). Pola Hubungan Kerja Nelayan Perairan Umum Daratan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 3(2), 143-151. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v3i2.319>.
- Halim, A., Loneragan, N. R., Wiryawan, B., Fujita, R., Adhuri, D. S., Hordyk, A. R., & Sondita, M. F. A. (2020). Transforming Traditional Management into Contemporary Territorial-Based Fisheries Management Rights for Small-Scale Fisheries in Indonesia. *Marine Policy*, 116, 103923. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103923>.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Kassa, N. N. (2025). *Jelajah Daulat Pangan 2025: Potensi Produksi Perikanan Tangkap Sulsel Capai 1 Juta Ton per Tahun*. URL: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20250611/539/1884255/jelajah-daulat-pangan-2025-potensi-produksi-perikanan-tangkap-sulsel-capai-1-juta-ton-per-tahun>. Diakses pada 9 Mei 2026.
- Laksani, M. R. T., Pramithasari, F. A., & Arrofiqi, F. (2025). Sosialisasi Penerapan Apartemen Ikan sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir di Bancaran. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 4(4), 470–477. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v4i4.7129>.
- Muawanah, U., Yusuf, G., Adrianto, L., Kalther, J., Pomeroy, R., Abdullah, H., & Ruchimat, T. (2018). Review of National Laws and Regulation in Indonesia in Relation to an Ecosystem Approach to Fisheries Management. *Marine Policy*, 91, 150-160. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.01.027>.
- Nanto, A. H., Susanto, A., & Khalifa, M. A. (2024). Identifikasi Kesesuaian Lokasi Penempatan Rumah Ikan di Perairan Pulau Kalih Kabupaten Serang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 13(2), 148-156. <http://dx.doi.org/10.33512/jpk.v13i2.24147>.
- Rakhman, F. & Chandra, W. (2024). *Indonesian Fishers Mount a Community-Led Fight Against Destructive Fishing*. URL: <https://news.mongabay.com/2024/06/indonesia-fishers-marine-patrol-pokmaswas-destructive-illegal-fishing/>. Diakses pada 9 Mei 2026.
- Riyono. (2026). *Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat*. URL: <https://fraksi.pks.id/2026/04/13/pangan-biru-dan-nelayan-kuat-indonesia-berdaulat/>. Diakses

**IMPLEMENTASI PROGRAM APARTEMEN IKAN SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN
KELAUTAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Aiman Sabar Rezeky¹, Ghaitsa Zahira Sofa², Nurul Aulia³, Naya Tsaqifah Fisabilillah⁴

pada 9 Mei 2026.

Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma.

Trenggono, S. W. (2024). *KKP: Ekonomi Biru Wujudkan Indonesia Setara dengan Negara Maju*.

URL: <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/detail/id/19328>. Diakses pada 9 Mei 2026.